

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bandara Antariksa merupakan fasilitas peluncuran yang telah digunakan minimal satu kali peluncuran orbital yang berhasil. Bandara antariksa sendiri diperkenalkan oleh negara-negara yang memiliki akses independen ke antariksa yang biasa disebut dengan *spacefaring nation*. Bandara antariksa tidak hanya dibangun oleh *spacefaring nation* saja tetapi *non-spacefaring nation* seperti Indonesia. Indonesia sudah mempunyai rencana untuk membangun bandara antariksa sejak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menerbitkan Studi Kelayakan Bandar Antariksa Ekuator Biak pada tahun 1990. Pembangunan Bandara Antariksa merupakan misi penyelenggaraan keantariksaan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk (Renduk) Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 yang mana menjelaskan peran LAPAN yang perlu menjalin kerja sama dari segi pengoperasian, pembangunan maupun pengembangan bandara antariksa (Peraturan Presiden RI, 2017).

Pengembangan kegiatan keantariksaan Indonesia tergantung kepada bagaimana LAPAN mengembangkan teknologi antariksa (roket, satelit, dan bandara antariksa). Pedoman tersebut terbagi menjadi lima tahapan yang masing-masing memiliki waktu lima tahun (Triharjanto, no date). Tahun 2036-2040 merupakan tahapan terakhir dari pengembangan teknologi peroketan. LAPAN diharapkan memiliki program peluncuran Low Earth Orbit (LEO, sedangkan untuk teknologi satelit, LAPAN diharapkan meluncurkan serta mengoperasikan satelit observasi bumi; telekomunikasi dan navigasi (Nasution and Rafikasari, 2016). Pada saat itulah LAPAN harus sudah memiliki bandara antariksa. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kapasitas LAPAN sehingga memerlukan kerja sama yang harus diakui merupakan elemen penting dalam mengembangkan teknologi antariksa Indonesia terutama dalam mengatasi biaya dan resiko yang tinggi.

Pada 2 Oktober 2013, Indonesia dan China telah setuju dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Tujuan Damai. Bidang kerja sama ini meliputi bidang peluncuran satelit ruang angkasa, pengamatan bumi, sistem navigasi, roket penyelidikan, pelatihan atau pendidikan, dan teknologi aeronautika. Indonesia memiliki posisi geografis, geostrategis dan geopolitik yang cukup bagus dan hal tersebut memaksa Indonesia untuk lebih memikirkan perlindungan dan mempertahankan kepentingan terhadap seluruh wilayahnya yang tersebar luas bahkan hingga ruang udaranya. Salah satu alasan Indonesia memiliki kepentingan ruang antariksa dan ruang udara yaitu adanya Konsepsi Wawasan Nusantara yang menjelaskan bahwa wilayah Republik Indonesia harus dioptimalkan mungkin demi kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara. (Kusrahmadi, no date). Untuk sekarang ini, Indonesia masih harus bergantung pada negara yang lebih unggul terkait penguasaan teknologi antariksa seperti pembuatan roket, satelit maupun bandara antariksa. Artinya menang hal tersebut adalah salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasional walaupun masih menyandang sebagai negara berkembang,

Kepentingan nasional adalah suatu hal yang harus dicapai oleh setiap negara untuk bisa tetap bertahan dan berkembang terutama di masa pertumbuhan teknologi dan industri di masa sekarang ini. Disisi lain, teknologi antariksa kini dapat digunakan untuk kepentingan sipil dan militer karena sifatnya yang dual use. Maka dari itu Indonesia terus mengupayakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi antariksa terutama dengan mengandalkan bantuan dari negara lain terlebih dahulu sebelum bisa menjadi spacefaring nation sendiri. Teknologi antariksa memiliki beberapa manfaat seperti memberikan keamanan nasional, pengintaian, meteorologi, rudal peringatan, komunikasi dan navigasi. Indonesia sangat antusias menyambut hal ini karena memang teknologi ini memiliki banyak manfaat seperti dapat memberikan informasi dan data yang penting bagi suatu negara. Untuk kegiatan sipil maupun militer, bisa berguna untuk memfasilitasi komunikasi dan menyediakan data navigasi.

Pada saat ini industri antariksa internasional masih dikuasai oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) bahkan hingga berabad-abad yang diantaranya untuk kepentingan komersial, sipil maupun keamanan nasionalnya. Hal tersebut tidak terlepas dari persaingannya pada masa perang dingin dengan Uni Soviet. Teknologi kedirgantaraan digunakan sebagai alat persaingan oleh kedua negara untuk memperoleh power masing-masing. Selain negara tersebut,

Tiongkok mulai muncul sebagai rival baru karena mempunyai kemampuan mandiri dalam keantariksaan yang artinya sudah tidak membutuhkan bantuan dari negara lain. AS dan Tiongkok kemudian mengadakan sidang kongres yang bertema *Economic and Security Review Commission*. Kongres tersebut menjelaskan bahwa program antariksa China melalui CNSA bertujuan untuk dapat setara dengan AS yang diharapkan mampu mengejar progress yang telah dilakukan oleh NASA (CNN Indonesia, 2015).

Hubungan Indonesia dan China dalam bidang keantariksaan, secara resmi telah dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2005 yaitu pada saat didirikannya APSCO (Asean Pacific Space Cooperation Organization). APSCO kemudian ditandatangani oleh delapan (8) negara anggotanya yaitu: Indonesia, Tiongkok, Thailand, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Bangladesh. Status Indonesia disini belum menjadi anggota tetap meskipun sudah menandatangani (Sudjatmiko, no date). China menganggap Indonesia sebagai wilayah strategis yang tidak dimiliki oleh negara lainnya dan melihat Indonesia sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan keamanan China di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat China selalu berusaha untuk melakukan upaya untuk mendapatkan segala kepentingannya termasuk Indonesia. Langkah China selanjutnya yaitu mendekati Indonesia dengan menggali manfaat sebesar-besarnya dari posisi dan letak geografis Indonesia terkait pengembangan teknologi antariksa serta peran politik internasionalnya.

Penelitian ini bermaksud menjelaskan kecenderungan Kebijakan Luar Negeri China dalam menggunakan power-nya dalam menarik mitra diplomasinya dalam Kerjasama Keantariksaan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ingin dicapai Indonesia dalam pengembangan teknologi antariksa dalam mewujudkan keamanan nasional melalui Renduk Keantariksaan LAPAN. Dengan demikian akan memberi sudut pandang yang berbeda mengenai maksud kedua negara dalam Kerjasama Spaceport.

1.2. Rumusan Masalah

Hal yang kemudian dirumuskan menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana investasi mempengaruhi pembangunan oleh asing dalam kerjasama pembangunan bandara antariksa Indonesia dengan China dan Keberhasilan kerjasama investasi dengan China dalam mewujudkan Indonesia sebagai *spacefaring nation*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerjasama spaceport Indonesia dengan China dalam mewujudkan Indonesia sebagai *spacefaring nation* serta mengetahui bahwa investasi bisa mempengaruhi pembangunan spaceport.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Akademis

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih dan memperkaya kajian terhadap Indonesia khususnya mengenai keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan *spacefaring nation* dalam kerjasama spaceport antara Indonesia dengan China dan sejauh mana keikutsertaan Indonesia dalam bidang keantariksaan serta pentingnya peran investasi dalam pembangunan spaceport

1.4.2. Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dari sudut pandang yang berbeda bagi pembaca maupun pihak yang terkait dalam penelitian ini dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai mimpi Indonesia untuk menjadi *spacefaring nation* serta faktor investasi yang bisa mempengaruhi pembangunan spaceport.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konsep Space Power

Teori *Space Power* menjadi konsep yang menarik perhatian terutama bagi *spacefaring nation* seperti Amerika Serikat (AS) dan RRC. Konsep *Space Power* sendiri pertama kali muncul pada awal tahun 1960an dan merupakan perkembangan dari Teori *Air Power* yang digagas oleh militer AS (Lutes and Hays, no date).

Definisi *Space Power* yang paling umum digunakan adalah “*the capacity of a country to take advantage of the space climate in quest for a public objectives and purposes and incorporates the whole astronautical abilities of the country*” (Lupton and Col, no date). Lebih detail Lupton mendefinisikan *Space Power* sebagai kekuatan dan kemampuan sebuah negara untuk melakukan dan mempengaruhi kegiatan untuk, di, melalui dan dari antariksa untuk mencapai tujuan dan

sasarannya untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan dan dapat mengubah perilaku pihak lain dengan cara mengeksploitasi sistem antariksa. Oleh karena itu, *Space Power* dapat mempengaruhi lingkungan dan perilaku pihak lain. Dengan kata lain, Space power digunakan dalam rangka meraih tujuan nasional nasional dengan menggunakan kemampuan teknologi antariksa. *Space Power* terdiri dari sekumpulan elemen yang saling terkait yang terdiri dari rangkaian interaksi yang kompleks antara program sipil, ekonomi, dan militer, serta kekuatan ekonomi, militer dan soft power.

Dalam Konteks kekuatan nasional, *Space Power* menjadi tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Lupton berpendapat bahwa Space Power sebagai salah satu elemen dari national Power seperti halnya kekuatan udara, laut, dan darat. Oleh karena itu, keantariksaan menjadi elemen penting dalam mendukung kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2. Teori Keamanan dan Konsep Kepentingan Nasional

Menyandang sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidaklah mudah bagi negara untuk menjaga seluruh keamanan nasional nya, keamanan nasional dianggap sebagai strategi dalam pertahanan negara terutama Indonesia. Kestabilan keamanan nasional ini sangat penting karena untuk mencapai tujuan nasionalnya sendiri. Tujuan nasional tersebut untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama memajukan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa tanah air dan turut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk menjaga dan melindungi upaya tersebut diperlukan kebijakan keamanan yang meliputi keamanan masyarakat, keamanan di dalam negeri, serta keamanan negara. Tujuan keamanan nasional adalah bagaimana suatu negara menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu negara dalam menghadapi kemungkinan terburuknya atau ancaman yang datang (Praditya, 2016). Dalam konsep ini banyak yang menekankan pada kemampuan pemerintah karena negara adalah subjek sekaligus objek kemanan dengan usaha menjaga keamanan negaranya dalam melindungi integritas negara karena kondisi aman ini sangat diinginkan oleh semua warga negara.

Keamanan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi bahaya dan ancaman yang akan datang. Tercapainya tujuan nasional memiliki beberapa aspek seperti terjaminnya keamanan, ketertiban dan keberhasilan hukum bisa menunjukkan keberhasilan

keamanan suatu negara. Dalam Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional pada Pasal 1 ayat (1), telah dijelaskan bahwa beberapa aspek seperti mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan masyarakat dari ancaman dan gangguan disebut sebagai Pertahanan Negara. Maka pertahanan negara melibatkan seluruh komponen warga negara, wilayah dan sumber daya alam demi terciptanya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan Bersama tersebut dari segala ancaman. Tujuan keamanan nasional bisa digambarkan dengan terwujudnya cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional melalui terjaminnya seluruh proses yang diperlukan dengan pembangunan nasional. Maka definisi keamanan disini bukan hanya sekedar mendapatkan kondisi aman dan tentram saja tetapi melihat betapa pentingnya keselamatan atau kelangsungan hidup bagi seluruh warga negara.

Secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk mengetahui maksud apa yang dilakukan negara melalui perilaku politik luar negerinya. Tujuan dari dilaksanakannya politik luar negeri salah satunya adalah dapat terwujudnya kepentingan nasional sebuah negara. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh terwujudnya kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh *National Power*. Hal tersebut kemudian memberikan impact pada kebijakan yang diambil suatu negara dan akan memberikan pengaruh terhadap negara lainnya.

1.5.3. Teori Kebijakan Luar Negeri

Secara umum, kebijakan luar negeri adalah serangkaian tindakan dan strategi yang digunakan suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain yang meliputi beberapa bidang untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri menurut pandangan dari Webber dan Smith adalah sebuah kebijakan yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah dalam bertindak dengan pihak luar yang terdiri dari upaya pencapaian tujuan, decision making, dan tindakan yang diambil oleh negara, selain itu juga untuk mengendalikan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar (Webber and Smith, no date). Sedangkan Kebijakan Luar Negeri menurut Kegley dan Wittkopf adalah sebuah kebijakan pemerintah terhadap lingkungan internasional yang dilandasi oleh adanya kepentingan nasional dan tujuan (Kegley and Blanton, 2010).

Kebijakan Luar Negeri menurut Joshua Goldstein menjelaskan bahwa serangkaian strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan kegiatannya di dunia internasional.

Sedangkan James N Rosenau berpendapat terkait fungsinya yang digunakan untuk melakukan analisis dan valuasi terhadap seluruh kekuatan internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi kebijakan luar negerinya terhadap negara lain (Rosenau, Boyd and Thompson, 1976). Di sisi lain, Kebijakan luar negeri juga disimpulkan sebagai serangkaian tahapan dan komitmen yang pada akhirnya menjadi dasar bagi perilaku pemerintah sendiri dalam berinteraksi dengan aktor dan negara lain. (Jemadu, 2008). Sedangkan pandangan lainnya menurut Kegley dan Wittkopf lebih menjelaskan bahwa “decisions governing authorities make to realize international goals” yaitu tetap harus memperhatikan poin penting yang mendasari perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Mark R. Armstutz, kebijakan luar negeri diartikan sebagai “*explicit and of governmental officials designed to promote national interest beyond a country’s territorial boundries*” yang terdapat beberapa langkah seperti seluruh aktifitas dan kegiatan dari kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dan sejauh mana jangkauan bahkan kerjasama dalam kebijakan luar negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa semua kebijakan pemerintah yang berdampak pada negara lain merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri (Jemadu, 2008).

Pendapat K.J. Holsti melalui teorinya, bahwa kerjasama adalah bentuk hubungan dengan mengajukan alternatif seperti adanya solusi, negosiasi, atau diskusi mengenai masalah yang sedang dihadapi, serta menjelaskan berbagai bukti teknis untuk proses penyelesaian masalah dan mengakhiri negosiasi dengan membentuk beberapa kesepakatan atau perjanjian. Dengan demikian kedua belah pihak akan saling mengerti satu sama lain. (Thies, 2017) Maka kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya negara dengan memanfaatkan powernya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Sedangkan dalam konteks kerjasama bilateral, dalam kamus politik internasional telah dijelaskan bahwa “*Hubungan bilateral atau multilateral adalah kondisi dimana suatu hubungan yang mempengaruhi satu sama lain atau terjadinya interaksi antara dua negara*” (Krisna, 1993). Maka hubungan bilateral dan multilateral dapat digaris bawahi sebagai interaksi yang saling mempengaruhi antara dua negara. (Thies, 2017).

Kebanyakan penelitian yang sudah ada mendasarkan pada perbedaan objek seperti hanya menjelaskan kemitraan strategis dan bisnis keantiksaan secara keseluruhan. Namun ada beberapa contoh negara yang melakukan Kerjasama dengan melihat kapabilitas negara seperti, Eko (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Peningkatan Kapabilitas Keantariksaan India Pada Era Kepemimpinan Narendra Modi” yang mengatakan bahwa India yang terlihat dari kepemilikan

teknologi antariksa yang prestisius dalam bentuk Human Spaceflight Programme, Anti-Satellite Missile, South Asia Satellite, dan peningkatan kerjasama strategis di bidang keantariksaan dengan spacefaring states. Narendra Modi, dalam pidatonya, menyatakan bahwa India siap berkompetisi dengan global great power lainnya. Penelitian tersebut berfokus pada upaya untuk menganalisis motif India dalam meningkatkan program-program keantariksaan yang prestisius serta kerjasama strategis dengan spacefaring states yang lain, serta bagaimana hal itu memiliki korelasi keantariksaan terhadap status sebuah negara sebagai great power di aspek keantariksaan. Namun penulis hanya menggunakan pendekatan politik keantariksaan saja dan berhasil menemukan fakta bahwa motif India dalam pembangunan aspek keantariksannya adalah untuk mendapatkan status global great power, yang menjadi bagian dari kepentingan nasional. Dari tiga indikator utama, yaitu kapabilitas ekonomi, kapabilitas militer, dan dukungan negara tetangga, peneliti menemukan bahwa India telah memenuhi dua indikator untuk menjadi negara yang berorientasi ke aspek keantariksaan.

1.6. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah Indonesia menjalin kerjasama keantariksaan dengan China karena ingin mencapai kepentingan nasional dalam mewujudkan keamanan dan meningkatkan power dalam sistem internasional serta Investasi industri swasta dapat mempengaruhi negara dalam pembangunan *spaceport*.

1.7. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data sebagai berikut:

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian melakukan studi literatur melalui buku-buku, artikel, jurnal internasional, dan juga data-data lain yang mendukung dan berkaitan termasuk media massa seperti internet dan koran. Metode lainnya yaitu dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen dari yang telah ada terkait dengan penelitian ini.

1.7.2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya untuk memperjelas makna data penelitian dengan cara mengumpulkan data menurut klasifikasi tertentu. Proses analisa data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih yang utama, memfokuskan pada yang paling penting, dan menghilangkan yang tidak perlu. Reduksi data dapat dicapai dengan melakukan proses abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk membuat ringkasan inti, proses, dan pernyataan yang perlu dipertahankan dalam data penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus karena peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan kunci dari data yang diperoleh.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan supaya dapat melihat gambaran besar atau bagian tertentu dari gambaran besar tersebut. Pada titik ini, peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan topik.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis. Pada bagian ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan atau rancangan garis besar penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II: PERJANJIAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN CHINA

Bab ini merupakan bab pembahasan yang terdiri dari penjabaran objek penelitian seperti pengertian *spacefaring nation* secara komprehensif dan menjelaskan Rencana Induk LAPAN sehingga dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan

BAB III: ANALISIS KERJASAMA BILATERAL DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEANTARIKSAAN

Bab ini merupakan bab analisis yang akan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini akan berfokus pada pengaruh investasi dalam pembangunan *spaceport* serta melihat upaya Indonesia dalam mewujudkan *spacefaring nation* melalui kerjasama dengan China. Penulis akan melihat bagaimana investasi bisa mempengaruhi negara dalam pembangunan *spaceport* serta keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan *spacefaring nation*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang akan memberikan sebuah kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang telah ditemukan oleh penulis selama melakukan penelitian ini dan berisi tentang kekerungan – kekurangan dalam penelitian ini.